



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



Sunset View – Labuan Bajo



Prepared By:

**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024.

LKIP merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban/akuntabilitas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu satu tahun sekali, serta sebagai gambaran tingkat capaian kinerja instansi pemerintah (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis (*Strategic Planning*) yang ditetapkan.

Segala bentuk kemajuan dan keberhasilan yang dicapai selama tahun 2024 merupakan upaya bersama dari seluruh *stakeholders* pariwisata dan ekonomi kreatif meskipun terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan. Disadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dalam rangka pemberian layanan pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih baik di Tahun 2025.

Semoga laporan ini dapat memenuhi prinsip dan substansi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tetap memenuhi azas tertib, transparansi dan akuntabilitas, sehingga apa yang telah dilaksanakan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, kami menerima masukan dan saran dari semua pihak yang kiranya bermanfaat bagi kemajuan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024.

Kupang, Januari 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP 197111271998031005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LKIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalankan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025: “NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah terkait pembangunan urusan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yaitu **Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial**. Sasaran dari tujuan Rencana Pembangunan Daerah yaitu: **Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian**. Indikator sasaran pada tahun 2024 terdiri dari:

1. Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%) sebesar 7,59% dengan pencapaian 7,77%
2. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp.Juta) Sebesar Rp. 85.119,30 juta, dengan pencapaian Rp. 934.730 Juta.

Sasaran dan indikator kinerja daerah terdistribusi dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dari Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026:

a. Tujuan:

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

b. Sasaran:

Meningkatnya kualitas promosi daya Tarik wisata dan kualitas SDM pariwisata serta ekonomi kreatif.

Capaian indikator pengukuran Renstra tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kuantitas promosi pariwisata (jumlah kegiatan promosi) dengan kuantitas target 14 kegiatan promosi dapat dilaksanakan sejumlah 14 kegiatan promosi
- Meningkatkan jumlah produk ekraf yang dipasarkan berbasis digital (jumlah produk) dengan kuantitas target 100 produk, dapat dilaksanakan sejumlah 30 produk
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata (orang bersertifikat) dengan target 40 orang, pencapaian target 240 orang
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM ekonomi kreatif (orang bersertifikat) dengan target 40 orang, pencapaian target sebesar 30 orang
- Meningkatkan kualitas destinasi wisata (jumlah lokasi DTW) dengan target 1 destinasi, pencapaian target nol

- Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui fasilitasi HKI (jumlah fasilitasi HKI dengan target 100 HKI, realisasi sebesar 162 HKI)

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, kendala utama yang dihadapi antara lain; Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten serta perlunya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dengan memperhatikan gambaran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat dijadikan bahan penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan bagi kegiatan tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
D. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI TAHUN 2024	3
E. ISU-ISU STRATEGIS	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI	10
B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	21
B. PENGUKURAN KINERJA	21
C. CAPAIAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	23
D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	44
E. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF YANG DIAMBIL	45

BAB IV PENUTUP	47
A. KESIMPULAN.....	47
B. SARAN	48

LAMPIRAN

LEMBAR VERIFIKASI LKIP 2024

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DISPAREKRAF PROVINSI NTT

DAFTAR TABEL

Tabel. I.1. Komposisi Pegawai berdasarkan Gol/Ruang Keadaan 31 Desember 2024	5
Tabel. I.2. Komposisi PNS berdasarkan Agama Keadaan 31 Desember 2024	5
Tabel. I.3. Komposisi PNS berdasarkan Jabatan Struktural Keadaan 31 Desember 2024	6
Tabel. I.4. Komposisi PNS pada Sekretariat / Bidang Keadaan 31 Desember 2024	6
Tabel. I.5. Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan 31 Desember 2024	6
Tabel I.6. Komposisi Tenaga Kontrak Keadaan 31 Desember 2024	7
Tabel II.1. Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Dinas Parekraf NTT 2024-2026	11
Tabel II.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Dinas Parekraf NTT 2024	14
Tabel.II.3. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU PD	16
Tabel II.4. Target dan Rencana Anggaran Tugas Pembantuan	18
Tabel II.5. Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Parekraf Tahun 2024	19
Tabel III.1. Pencapaian Kinerja	23
Tabel III.2. Realisasi Belanja APBD Tahun 2024	24
Tabel III.3. Realisasi Belanja APBD Berdasarkan Kegiatan dan Sub Kegiatan	26
Tabel III.4. Realisasi Belanja APBN (Tugas Pembantuan) Tahun 2024	38
Tabel III.5. Realisasi Kinerja Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah	39
Table III.6 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja 2024	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.....	9
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun dalam rangka pelaksanaan Amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis global dan berbagai arah kebijakan pembangunan nasional bidang pariwisata, serta Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dalam RPJMN 2020-2024, yang merupakan cerminan amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo - Ma'aruf Amin sebagaimana tertuang dalam 5 Prioritas Kerja Presiden 2019-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dari Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur berfungsi untuk melaporkan tentang perbandingan antara rencana kinerja dengan capaian kinerja Tahun 2024. Selain itu, LKIP juga berfungsi sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan (*sustainable*).

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berdasarkan pada amanat Peraturan Perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 –2025;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi NTT (RIPPARPROV NTT);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional;

18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Gubernur NTT Nomor 88 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah: “sebagai media pertanggungjawaban/akuntabilitas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu satu tahun sekali, serta sebagai gambaran tingkat capaian kinerja instansi pemerintah (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur) dalam upaya pencapaian tujuan dan kemajuan dalam menjalankan tugas dan fungsi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sedangkan yang menjadi tujuannya adalah :

1. Mendukung terwujudnya Pemerintahan yang baik, bersih dan penuh tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan;
2. Sebagai media informasi bagi Pemerintah Provinsi NTT dan masyarakat Nusa Tenggara Timur mengenai kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT selama satu tahun anggaran;
3. Sebagai bahan evaluasi dan instrospeksi terhadap keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang.

D. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI TAHUN 2024

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif selama. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi amanat peraturan perundang-undangan, juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong dan mengawal Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini adalah:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing pariwisata dengan provinsi lain;
- 2) Investasi kepariwisataan belum berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat lokal;
- 3) Infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang belum memadai;
- 4) Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pembangunan kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur.

1. Tupoksi dan Struktur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada unsur pelaksana bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tugas dan fungsi yang diberikan sebagai berikut:

- Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- Menyelenggarakan fungsi
 - Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

b. Struktur Organisasi

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 2023, yang secara struktur memiliki organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat, yang terdiri atas :
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Bidang Pemasaran Pariwisata
- Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
- Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT berjumlah 73 orang, yang terdiri dari 45 orang laki-laki dan 29 orang perempuan. Selain itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT didukung tenaga

kontrak sebanyak 30 orang (18 orang laki-laki dan 12 orang perempuan). Gambaran selanjutnya dapat dilihat pada beberapa tabel sebagai berikut:

Tabel. I.1.
Komposisi Pegawai berdasarkan Gol/Ruang
Keadaan 31 Desember 2024

NO	GOL/RUANG	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1	Gol. IV/e	-	-	-	
	Gol. IV/d	-	-	-	
	Gol. IV/c	-	-	-	
	Gol. IV/b	6	-	6	
	Gol. IV/a	1	-	1	
	Jumlah Gol IV	7	-	7	9,46 %
2	Gol. III/d	11	13	24	
	Gol. III/c	6	3	9	
	Gol. III/b	3	6	9	
	Gol. III/a	7	5	12	
	Jumlah Gol. III	27	27	54	72,97 %
3	Gol. II/d	2	2	4	
	Gol. II/c	7	-	7	
	Gol. II/b	1	-	1	
	Gol. II/a	1	-	1	
	Jumlah Gol. II	11	2	13	17,57 %
4	Gol. I/d	-	-	-	
	Gol. I/c	-	-	-	
	Gol. I/b	-	-	-	
	Gol. I/a	-	-	-	
	Jumlah Gol. I	0	0	0	0%
	TOTAL (1+2+3+4)	45	29	74	100%

Dari paparan data pada tabel 1 di atas terlihat bahwa komposisi PNS Pria lebih banyak, yakni 45 org atau 60.81%, apabila dibandingkan dengan jumlah PNS Wanita sebanyak 29 org atau 39.19%.

Tabel I.2.
Komposisi PNS berdasarkan Agama
Keadaan 31 Desember 2024

NO	AGAMA	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Protestan	26	17	43	58,11 %
2.	Katholik	16	11	27	36,49 %
3.	Islam	3	1	4	5,40 %
4.	Hindu	-	-	-	0 %
5.	Budha	-	-	-	0 %
	TOTAL	45	29	74	100%

Tabel I.3.
Komposisi PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
Keadaan 31 Desember 2024

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH JABATAN	JABATAN TERISI			KET
			L	P	JLH	
1.	Eselon II	1	1	-	1	
2.	Eselon III	5	5	-	5	
3.	Eselon IV	1	1	-	1	
4.	Pejabat Fungsional Tertentu	10	6	4	10	
	TOTAL	17	13	4	17	

Tabel I.4.
Komposisi PNS pada Sekretariat / Bidang
Keadaan 31 Desember 2024

NO	SUBDIN/ BAGIAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Sekretariat	22	8	30	40,54 %
2.	Bidang Destinasi Pariwisata	8	3	11	14,86 %
3.	Bidang Pemasaran Pariwisata	3	9	12	16,22 %
4.	Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6	6	12	16,22 %
5.	Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6	3	9	12,16%
	TOTAL	45	29	74	100%

Tabel I.5.
Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
Keadaan 31 Desember 2024

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	S-3	-	-	-	0,00 %
2.	S-2	10	3	13	17,57 %
3.	S-1/D-IV	20	14	34	45,94 %
4.	Diploma/Sarjana Muda	5	9	14	18,93 %
5.	SLTA	8	3	11	14,86 %
6.	SLTP	2	-	2	2,70 %
7.	SD	-	-	-	0,00%
	TOTAL	45	29	74	100%

Selain Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat pegawai honorer/tenaga kontrak yang berjumlah 30 orang, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel I.6. berikut:

Tabel. I.6.
Komposisi Tenaga Kontrak
Keadaan 31 Desember 2024

NO.	JABATAN TENAGA KONTRAK	L	P	JLH	KET
1	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18	12	30	100 %

E. ISU-ISU STRATEGIS

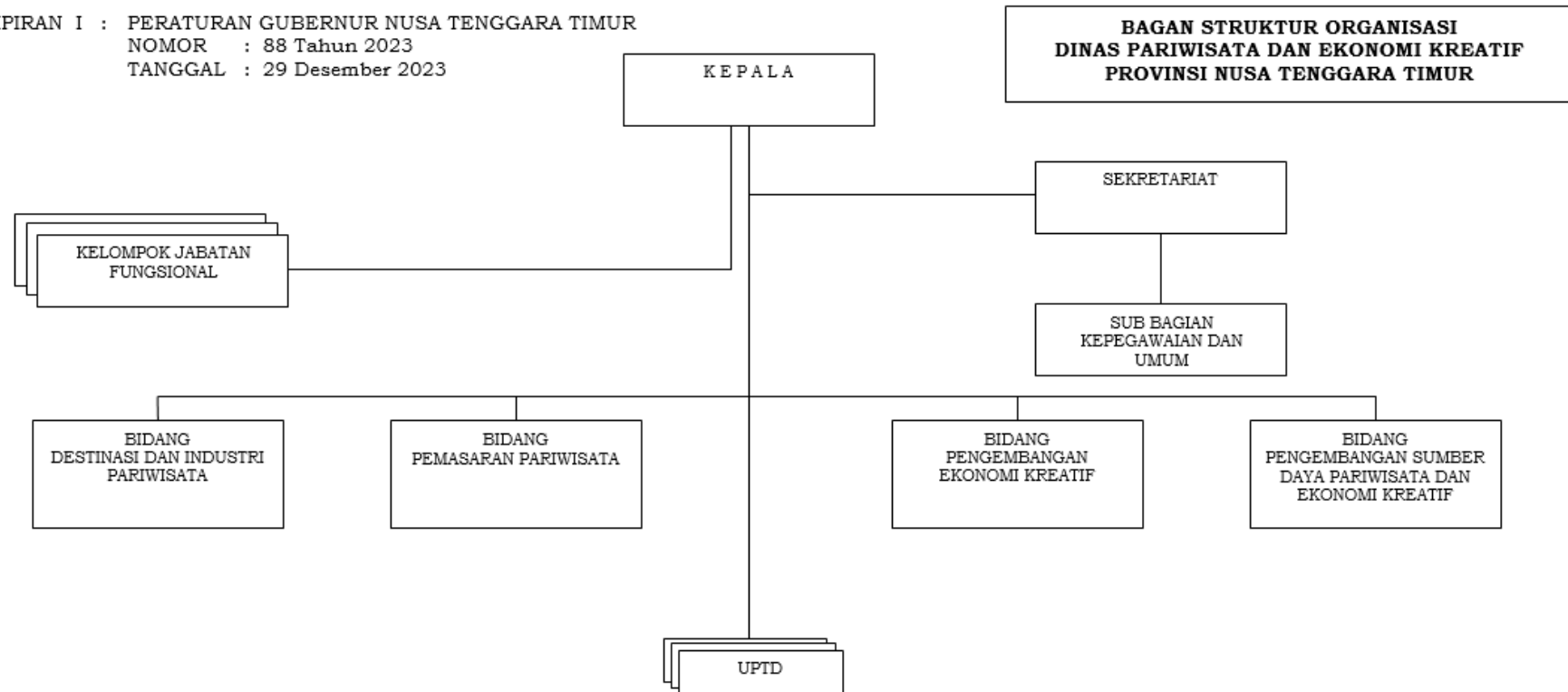
Isu-isu dari beberapa sudut pandang yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Rencana Strategis Kementerian, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain:

- Penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah dan uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan program dan kegiatan seperti tercantum pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian juga didasarkan pada tuntutan perkembangan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif secara global, nasional dan kondisi di Nusa Tenggara Timur;
- Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur yang berkompeten dan inovatif dalam menjalankan tugas pelayanan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT;
- Penyediaan fasilitas pendukung operasional perkantoran dalam mendukung aktivitas pelaksanaan perkantoran, pelayanan informasi publik dan promosi;
- Penguatan sarana-prasarana dasar pada lokasi aset pariwisata provinsi yaitu pantai Lasiana, Kampung Seni Flobamorata (eks gua monyet) dan Koanara/Kelimutu;
- Penataan asset cottage di lokasi Koanara Kabupaten Ende dan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk SDM di kawasan pariwisata strategis provinsi.
- Pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS) RBA*;
- Penyediaan regulasi hukum dan dokumen turunan RIPPARDA berupa Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, Master Plan Pengembangan Destinasi wisata, dan Rencana teknis pengembangan berupa *Detail Engineering Design (DED)*;

- i. Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi di 22 kabupaten/kota dengan memperhatikan arah rencana pengembangan KSPN di NTT dan rencana pengembangan kawasan pariwisata di setiap kabupaten/kota;
- j. Peningkatan kerjasama lintas sektor pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam bentuk forum diskusi regular dan kerjasama kemitraan;
- k. Penyediaan wadah kreasi pelaku IKM dan UKM di sektor ekonomi kreatif dan fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual produk dan usaha termasuk dukungan regulasi pembangunan dalam bentuk PERDA Ekonomi Kreatif.
- l. Peningkatan promosi pariwisata dari setiap daya tarik wisata dan destinasi wisata dengan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk produk industri ekonomi kreatif khususnya yang dihasilkan dari Kawasan destinasi wisata.

Gambar. I.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 88 Tahun 2023
 TANGGAL : 29 Desember 2023



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Kebijakan pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024 merupakan Periode kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

1. Visi RPJPD

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalankan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025:

“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

2. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

a. Tujuan

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah terkait pembangunan urusan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yaitu **Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial**

b. Sasaran

Sasaran dari tujuan Rencana Pembangunan Daerah yaitu: **Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian.** Indikator sasaran pada tahun 2024 terdiri dari:

3. Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%) sebesar 7,59%
4. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp.Juta) Sebesar Rp. 85.119,30 juta

3. RENSTRA

Kinerja pelayanan SKPD yang dapat digambarkan adalah dilihat dari seberapa besar capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA-P Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026. Adapun capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah:

c. Tujuan:

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dari sector pariwisata dan ekonomi kreatif

d. Sasaran:

Meningkatnya kualitas promosi daya Tarik wisata dan kualitas SDM pariwisata serta ekonomi kreatif

e. Strategi dan arah kebijakan 2024

1. Strategi: Meningkatkan kualitas promosi pariwisata

Arah Kebijakan: Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya Tarik destinasi dalam kawasan strategis pariwisata provinsi

2. Strategi: Meningkatnya jumlah produk ekraf yang dipasarkan berbasis digital

Arah Kebijakan: Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif

3. Strategi: Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata

Arah Kebijakan: Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan

4. Strategi: Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM ekonomi kreatif

Arah Kebijakan: Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif

5. Strategi: Meningkatnya kualitas destinasi wisata

Arah Kebijakan: Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata provinsi dan pengelolaan destinasi pariwisata provinsi

6. Strategi: Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui fasilitasi HKI

Arah Kebijakan: Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif

Pengukuran pencapaian sasaran beserta indikator RENSTRA dijabarkan ada tabel berikut:

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Dalam Renstra Dinas Perekraf NTT 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2021	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kuantitas promosi pariwisata (jumlah kegiatan promosi)	n/a	14 kegiatan promosi	14 kegiatan promosi	16 kegiatan promosi	44 kegiatan promosi
		2. Meningkatnya jumlah produk ekraf yang dipasarkan berbasis digital (jumlah produk)	n/a	100 produk	100 produk	100 produk	300 produk
		3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata (orang bersertifikat)	96 orang	40 orang	40 orang	40 orang	120 orang
		4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM ekonomi kreatif (orang bersertifikat)	n/a	40 orang	40 orang	40 orang	120 orang
		5. Meningkatnya kualitas destinasi wisata (jumlah lokasi DTW)	14 Destinasi	1 Destinasi	1 Destinasi	3 Destinasi	14 Destinasi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2021	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui fasilitasi HKI (jumlah fasilitasi HKI)	165 HKI	100 HKI	100 HKI	100 HKI	465 HKI

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2024

Rencana Kerja urusan dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kedalam tujuan dan sasaran renstra.

1. Pohon Kinerja

Tujuan kinerja adalah Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dari sector pariwisata dan ekonomi kreatif di jabarkan dalam dua sector utama yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif:

- a. Tujuan: Meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata
 - Jumlah pemasaran produk/paket wisata bertambah
 - Rata-rata lama menginap bertambah
 - Penyediaan Daya tarik wisata beragam
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas atraksi wisata
 - jumlah kunjungan wisatawan meningkat
 - Promosi daya tarik wisata
 - Penyelenggaraan event pariwisata
 - Penyediaan konten promosi digital
 - Penyediaan Travel Pattern
 - Pembuatan paket wisata
 - Insentif wisata
 - Kemudahan akses destinasi wisata
 - Subsidi pelayanan jasa wisata
 - Meningkatkan investasi sektor pariwisata
 - pelayanan perijinan efektif dan efisien
 - jaminan investasi meningkat
 - perencanaan dan kesiapan lokasi investasi tersedia
 - Meningkatkan jumlah PAD
 - Meningkatkan nilai retribusi dan pajak sektor pariwisata
 - Meningkatkan jumlah objek pajak dan retribusi
 - Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata
 - Fasilitas penunjang kawasan wisata
 - Fasilitas akomodasi, telekomunikasi, transportasi
 - Akses ke lokasi wisata
 - Jalan menuju kawasan dan dalam kawasan
 - Tatakelola destinasi wisata
 - Lembaga pengelola kawasan wisata
- b. Tujuan: Meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi kreatif
 - Peningkatan pemasaran produk ekraf
 - Perluasan pasar digital
 - Peningkatan kapasitas produksi
 - Peningkatan kualitas produk
 - Peningkatan inovasi dan kreatifitas produk dan layanan inovatif

- Pencitraan produk baru atau produk turunan
- Riset pengembangan produk
- Peningkatan pendidikan dan pelatihan
 - Sertifikasi keahlian sektor ekraf
 - Pelatihan pengembangan usaha
 - Pelatihan peningkatan ketrampilan
 - Pelatihan pemasaran digital
- Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam cara produksi, distribusi dan pemasaran
 - Pemasaran digital
 - Media sosial
 - Marketplace
 - Website
 - Promosi digital
 - Website
 - Media sosial
- Pengembangan konten kreatif
 - Pemanfaatan teknologi pendukung produksi
 - Desain produk
 - Peralatan produksi
- Kerjasama dan peningkatan jaringan dan investasi
 - Promosi kerjasama investasi
 - Penyiapan rancangan pengembangan investasi
- Dukungan kebijakan pengembangan usaha ekonomi kreatif
 - Kemudahan akses pasar
 - Lembaga sertifikasi dan jaminan produk
 - Kebijakan pro terhadap produk lokal
- Pemberian Insentif fiskal dan subsidi
 - Subsidi Pembukaan unit usaha baru
 - Dukungan permodalan pengembangan usaha
- Dukungan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual
 - Bantuan biaya pengurusan HKI

2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

Penjabaran Program dan kegiatan tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata:
 - 1) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
- c. Program Pemasaran Pariwisata:
 - 1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
- d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual:

1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan;
- 2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

Tabel II.2 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dinas Parekraf NTT 2024

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2022)	Target Capaian Tahun 2024
Tujuan: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Promosi Daya Tarik Wisata dan Kualitas SDM Pariwisata serta Ekonomi Kreatif				
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara	100 %	100 %
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	24 Destinasi	1 Destinasi
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	NA %	4.17 %
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	NA Dokumen	2 Dokumen
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi	100 %	100 %
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Melalui OSS	44 Rekomendasi	100% Rekomendasi
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)	0 %	31.82 %
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah DTW yang Dipromosikan	NA DTW	14 DTW

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2022)	Target Capaian Tahun 2024
		<i>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>NA Dokumen</i>	2 Dokumen
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)	0 %	33.33 %
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	165 Dokumen HKI	100 Dokumen HKI
			02. Persentase produk ekonomi kreatif yang dipasarkan melalui media digital	0 %	33.33 %
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital	NA Produk Ekraf	100 Produk Ekraf
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			01. Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	0 %	33.33 %
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata	96 Orang	40 Orang
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	02. Persentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya dan Fashion) yang bersertifikat	0 %	33.33 %
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif	NA Orang	40 Orang

3. Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024 berisi target indikator yang harus dicapai pada akhir tahun anggaran di uraikan pada tabel berikut:

Tabel II.3 Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	7,38 %	7,59 %	$\frac{A + B + C}{Z} \times 100\%$ Ket : A : Kontribusi lapangan usaha sektor penyediaan akomodasi dan makan minum B : Kontribusi lapangan usaha sektor transportasi – pergudangan C : Kontribusi lapangan usaha sektor jasa lainnya Z : Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi NTT Tahun 2024
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp Juta)	N/A	80.758,35 Juta	$(15\% \times D) + (70\% \times E) + (100\% \times F) + (90\% \times G)$ Ket : D : Kontribusi lapangan usaha sub sektor penyediaan makan minum E : Kontribusi lapangan usaha sub sektor industri makanan dan minuman F : Kontribusi lapangan usaha sub sektor industri pengolahan lainnya G : Kontribusi lapangan usaha sub sektor industri tekstil dan pakaian jadi
		Lama Tinggal Wisatawan (hari)	1,75 Hari	2 Hari	$R L T^* = J H T / J W M$ Keterangan : R L T : Rata-rata Lama Tinggal J H T : Jumlah Hari Tinggal Wisatawan J W M : Jumlah Wisatawan Menginap *Data dipublikasi oleh BPS NTT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.624.891 Orang	1.065.378 Orang	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 (data kompilasi 22 Kabupaten/Kota)

4. Pelaksanaan Anggaran

NO	Uraian	Alokasi	Keterangan
1	APBD		
	a) Belanja (program)	Rp. 10.435.071.360	Realisasi minimal 85%
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.165.071.360	Realisasi minimal 90 %
	2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 200.000.000	Realisasi minimal 85 %
	3. Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 195.000.000	Realisasi minimal 85 %
	4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 375.000.000	Realisasi minimal 85 %
	5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 1.500.000.000	Realisasi minimal 85 %
	b) Pendapatan	Rp. 310.000.000	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja + Pendapatan	Rp. 10.745.071.360	Realisasi minimal 90%
2	APBN		
	a) Program Dekonsentrasi	Rp. -	-
	b) Program Tugas Pembantuan	Rp. 1.835.000.000	Realisasi minimal 90%
	1. Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 1.705.000.000	Realisasi minimal 90%
	- Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Rp. 200.000.000	Realisasi minimal 90%
	- Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp. 200.000.000	Realisasi minimal 90%
	- Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Rp. 600.000.000	Realisasi minimal 90%
	- Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	Rp. 500.000.000	Realisasi minimal 90%
	- Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	Rp. 205.000.000	Realisasi minimal 90%

	2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 130.000.000	Realisasi minimal 90%
	- Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Rp. 130.000.000	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Tugas Pembantuan	Rp. 1.835.000.000	Realisasi minimal 90%

- C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (*e-catalog* dan toko daring) Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% per tanggal 31 Desember Tahun 2024;
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;
- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:
 - 1. TL rekomendasi Tahun 2024; Administrasi 100%, Keuangan 80%
 - 2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2024; Administrasi 100%, Keuangan 80%.
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah minimal 5 (lima) jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);

5. Tugas Pembantuan (TP) 2024

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024 mengelola dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebesar Rp. 1.835.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.4 Target dan Rencana Anggaran Tugas Pembantuan (TP)

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
	DANA TUGAS PEMBANTUAN			1.835.000.000
1	PROGRAM KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF			1.705.000.000
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	SDM Pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan melalui tugas pembantuan	20 orang, kegiatan	200.000.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	SDM ekonomi kreatif yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan melalui tugas pembantuan	30 orang, kegiatan	200.000.000
	▪ Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Pengembangan system informasi kepariwisataan nasional	1 kegiatan	600.000.000
	▪ Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	Konfrensi dan event	1 kegiatan	500.000.000
	▪ Pengembangan Industri Kunliner, Kuya, Desaian dan Fesyen	Fasilitasi dan pembinaan masyarakat	50 orang	205.000.000
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			130.000.000
	▪ Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Fasilitasi perencanaan dan keuangan	1 daerah	130.000.000

6. Pendapatan Asli Daerah

Pengelolaan asset pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi NTT meliputi:

Tabel II.5 Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	VOLUME / SATUAN	TARGET PENERIMAAN 2024 (Rp)
1	2	3	4
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		310.000.000
4.1.02.	Retribusi Daerah	1 Tahun	300.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha		300.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		175.000.000
	Rumah Dinas (7 Unit)		
	Kantin Pariwisata		
	Pariwisata Estate		

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	VOLUME / SATUAN	TARGET PENERIMAAN 2024 (Rp)
	Rumah Ekraf		
4.1.02.02.09	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga		125.000.000
	- Kawasan Pantai Lasiana		
	1. Tarif Karcis		
	- . Roda Dua		
	- . Roda Empat		
	- . Diatas Roda Empat		
	- . Dewasa		
	- . Anak - anak		
	2. Sewa Gedung		
	3. Sewa Resto		
	4. Tarif Pamakain MCK		
	5. Sewa Lapak di Pantai Lasiana		
	6. Sewa Lopo di Pantai Lasiana		
	7. Sewa pohon Kelapa / Pohon Tuak/ Lopo		
	8. Panjat Tebing		
	- Kawasan Gua Monyet		
	1. Tarif Karcis		
	a. Roda 2		
	b. Roda 4		
	2. Tarif Pamakain MCK		
	3. Sewa Pusat Kuliner dan Cendramata		
	4. Gazebo 3 Unit		
4.1.04.	Lain - lain PAD yang Sah	1 Tahun	10.000.000
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah		
TOTAL			310.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan sektor yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara sektor, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Acuan untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi NTT adalah, Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tahun 2024 – 2026), RKT 2024 dan Penetapan Kinerja 2024. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/*Key Performance Indikator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

B. PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan sektor kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan sektor kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$: Sangat Baik
- $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

C. CAPAIAN KINERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pengembangan objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, seperti biro perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan penyediaan transportasi wisata, akan berfungsi di samping meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan juga mendukung pengembangan objek dan daya tarik wisata baru. Hasil yang optimal akan diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai.

Dengan memperhatikan hal tersebut, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara terpadu antara berbagai komponen yang menentukan dan menunjang keberhasilannya, seperti objek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, dan industri cenderamata, serta melibatkan koperasi, swasta, dan masyarakat luas. Selain itu, sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan sangat penting untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Pencapaian kinerja berdasarkan pencapaian target dari beberapa alat ukur disampaikan pada table berikut:

Tabel III.1. Pencapaian Kinerja

No	Indikator Pengukuran	Persentase Capaian	Penilaian
1	Realisasi APBD	93,99%	Sangat Baik
2	Realisasi APBN	96,71%	Sangat Baik
3	Capaian Perjanjian Kinerja	89,9%	Sangat Baik
4	Capaian Renja	73,72%	Sangat Baik
5	Capaian Renstra	66%	Cukup Berhasil
	Rata-rata Kinerja	84,06 %	Berhasil

1. Realisasi Belanja APBD

Penetapan target capaian Tahun 2024 diasumsikan dengan input belanja program sebesar Rp. 10.565.764.160,- dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah hingga akhir tahun 2024 besar pendanaan memperoleh input biaya sebesar Rp. 10.435.071.360,- terdiri dari belanja program penunjang sebesar Rp. 8.165.071.360,- dan belanja program indikator utama sebesar Rp. 2.270.000.000,-realisasi keuangan APBD tahun 2024 sebesar Rp. 9.808.063.884,- (93,99%).

Rincian realisasi keuangan sumber dana APBD sesuai program dan sumber dana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.2. Realisasi Belanja APBD Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)	Keterangan Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.165.071.360 (Sumber Dana: DAU/PAD)	7.873.419.181	96.43	291.652.179	Belanja Gaji ASN dan Rutin Kantor
2	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	200.000.000 (Sumber Dana: PAD)	0	0	200.000.000	Tidak dapat dilaksanakan
	Program Pemasaran Pariwisata	195.000.000 (Sumber Dana: PAD)	159.924.275	82.01	35.075.725	Dukungan Kegiatan pada Cultural Night World Water Forum di Bali dan Cetak Bahan Promosi
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	375.000.000 (Sumber Dana: PAD)	354.922.527	94.65	20.077.473	Fasilitasi HKI dan Penyelenggaraan Kegiatan Indonesia Gastrodiplomacy Series 2024 di Labuan Bajo
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.500.000.000 (Sumber Dana: DAU SG)	1.419.797.901	94.65	80.202.099	Rakor & Evaluasi Pengembangan SDM dengan Mitra Kerja di Kota Kupang (50 Orang) Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata di Kab. Sumba Timur dan Kota Kupang (60 Orang) Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan di Kab. Manggarai Timur, Sabu Raijua dan Sikka (165 Orang) Sertifikasi Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Barista) di Kab. Manggarai Timur (30 Orang) Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata Sub Sektor Akomodasi di

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)	Keterangan Realisasi
						Kota Kupang, Kab. Manggarai, Kab. Belu (140 orang) Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata Sub Sektor Restoran di Kab. Sikka dan Kota Kupang (100 Orang)
	JUMLAH	10.435.071.360	9.808.063.884	93.99	627.007.476	

Penjabaran realisasi sesuai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.3. Realisasi Belanja APBD berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
3.26.0.00.0.00.01.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.435.071.360	9.808.063.884	627.007.476
1	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.165.071.360	7.873.419.181	291.652.179
36892	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.962.000	50.513.000	449.000
01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.000	50.000	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.950.000	4.950.000	-
01.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000	5.000.000	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.000	50.000	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.950.000	4.950.000	-
01.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.952.000	5.923.000	29.000
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	103.000	103.000	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.000	-	29.000
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	5.820.000	5.820.000	-
01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.000	50.000	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.950.000	4.950.000	-
01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.010.000	29.590.000	420.000
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.160.000	3.160.000	-

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	26.850.000	26.430.000	420.000
37257	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.710.310.000	6.498.300.057	212.009.943
01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.658.670.000	6.447.962.057	210.707.943
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	4.018.066.346	3.972.699.916	45.366.430
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	370.121.354	365.993.824	4.127.530
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	206.240.006	190.400.000	15.840.006
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	53.406.146	52.840.000	566.146
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	149.600.878	147.470.000	2.130.878
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	324.282.822	323.641.820	641.002
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.849.756	9.875.879	-26.123
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.055.579	52.983	1.002.596
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	211.083.588	205.711.641	5.371.947
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.348.802	8.116.594	232.208
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	25.046.520	24.350.013	696.507
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	17.474.214	-	17.474.214
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	510.906.856	491.366.392	19.540.464
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	744.187.133	655.442.995	88.744.138
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.250.000	-	5.250.000
5.1.01.03.02.0022.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.750.000	-	3.750.000
01.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.640.000	30.408.000	1.232.000
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.080.000	19.080.000	-
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.560.000	6.350.000	1.210.000
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	112.000	112.000	-

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.888.000	4.866.000	22.000
01.01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	4.978.000	22.000
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	112.000	112.000	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.888.000	4.866.000	22.000
01.01.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000	4.978.000	22.000
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	112.000	112.000	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.888.000	4.866.000	22.000
01.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.996.000	4.000
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	112.000	112.000	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.888.000	4.884.000	4.000
01.01.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	4.978.000	22.000
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	112.000	112.000	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.888.000	4.866.000	22.000
38353	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	9.964.000	36.000
01.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	4.978.000	22.000
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.000	50.000	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.950.000	4.928.000	22.000
01.01.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000	4.986.000	14.000
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.000	50.000	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.950.000	4.936.000	14.000
38718	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.413.000	165.176.113	16.236.887

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
01.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.018.000	17.991.560	26.440
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.368.000	5.363.360	4.640
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	770.000	770.000	-
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.280.000	4.280.000	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.115.000	5.104.200	10.800
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	655.000	644.000	11.000
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000	1.830.000	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-
01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	39.985.678	14.322
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.000.000	39.985.678	14.322
01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.395.000	107.198.875	16.196.125
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	114.355.000	99.038.875	15.316.125
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.040.000	8.160.000	880.000
39083	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.846.000	20.846.000	-
01.01.07.05	Pengadaan Mebel	20.846.000	20.846.000	-
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	6.000.000	6.000.000	-
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	2.855.000	2.855.000	-
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	11.991.000	11.991.000	-
39448	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.106.733.160	1.044.672.583	62.060.577
01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.188.000	105.170.500	17.500
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	104.000.000	103.982.500	17.500
5.1.02.02.15.0002.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	1.188.000	1.188.000	-
01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.001.545.160	939.502.083	62.043.077
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.798.000	6.762.625	35.375
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.177.104	1.177.000	104
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	742.000	742.000	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	-	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	2.400.000	-
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	921.600.000	864.000.000	57.600.000
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000	3.780.000	-
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	9.002.400	9.000.000	2.400
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.864.000	34.560.000	2.304.000
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.211.456	2.073.600	137.856
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.764.800	2.592.000	172.800
5.1.02.02.15.0002.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	968.400	300.000	668.400
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-	-
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	-	-	-
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	4.498.000	3.375.858	1.122.142
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.739.000	8.739.000	-
39814	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.807.200	83.947.428	859.772
01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.807.200	66.951.028	856.172

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.007.200	44.989.528	17.672
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.300.000	2.461.500	838.500
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	19.500.000	19.500.000	-
01.01.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.000.000	16.996.400	3.600
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	17.000.000	16.996.400	3.600
2	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	200.000.000	-	200.000.000
37289	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	200.000.000	-	200.000.000
02.02.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	200.000.000	-	200.000.000
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.552.000	-	2.552.000
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	845.000	-	845.000
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.828.000	-	1.828.000
5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.350.000	-	2.350.000
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.800.000	-	8.800.000
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77.625.000	-	77.625.000
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	-	6.000.000
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	100.000.000	-	100.000.000
3	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	195.000.000	159.924.275	35.075.725
36953	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	195.000.000	159.924.275	35.075.725

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
03.03.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	70.500.000	70.488.725	11.275
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	132.000	132.000	-
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	959.000	950.000	9.000
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.613.000	27.610.725	2.275
5.1.02.02.04.0133.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.296.000	10.296.000	-
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	31.500.000	31.500.000	-
03.03.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	124.500.000	89.435.550	35.064.450
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000	-	1.000
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	286.000	286.000	-
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	6.600.000	6.600.000	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	-	-
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	33.805.000	5.000.000	28.805.000
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.728.000	77.549.550	2.178.450
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.080.000	-	4.080.000
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	-	-	-
4	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	375.000.000	354.922.527	20.077.473
36985	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	300.000.000	285.818.527	14.181.473
04.04.01.06	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	300.000.000	285.818.527	14.181.473

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	650.000	650.000	-
1	2	3		14(3-13)
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.545.000	1.545.000	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.230.000	2.230.000	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.600.000	17.865.000	3.735.000
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	12.180.000	12.180.000	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68.150.000	57.703.527	10.446.473
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000	12.000.000	-
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	181.645.000	181.645.000	-
37350	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	75.000.000	69.104.000	5.896.000
04.04.02.13	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	75.000.000	69.104.000	5.896.000
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	416.000	416.000	-
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.545.000	1.545.000	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.103.000	2.103.000	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	45.000.000	40.800.000	4.200.000
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	11.550.000	11.520.000	30.000
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.386.000	8.370.000	1.016.000
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000	4.350.000	650.000
5	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.500.000.000	1.419.797.901	80.202.099
37016	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	829.874.000	790.045.560	39.828.440
05.05.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	829.874.000	790.045.560	39.828.440

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	285.000	285.000	-
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.702.000	1.702.000	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.425.000	11.425.000	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.500.000	93.460.000	40.000
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.250.000	12.250.000	-
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	258.000.000	258.000.000	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	-	-	-
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	60.500.000	60.500.000	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	316.327.000	276.593.560	39.733.440
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.480.000	7.480.000	-
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	68.405.000	68.350.000	55.000
37381	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	670.126.000	629.752.341	40.373.659
05.05.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	670.126.000	629.752.341	40.373.659
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.571.000	5.571.000	-
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.274.000	4.274.000	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.998.000	10.998.000	-
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000	100.000	-
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.828.000	1.828.000	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.750.000	11.750.000	-
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	26.790.000	26.790.000	-

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	92.560.000	92.560.000	-
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.400.000	40.400.000	-
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	82.200.000	82.200.000	-
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.000.000	6.000.000	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	-	-	-
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000	20.000.000	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	288.135.000	247.761.341	40.373.659
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.520.000	31.520.000	-
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48.000.000	48.000.000	-
		10.435.071.360	9.808.063.884	627.007.476

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT pada tahun anggaran 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 10.565.764.160 sesuai DPA SKPD Dinas Parekraf Provinsi NTT Nomor DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 29 Desember 2023, yang semuanya merupakan Belanja Operasi sebesar Rp 10.565.764.160. Realisasi belanja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT tahun 2024 sebesar Rp 9.808.063.884 atau 93,99 % dan ada sisa sebesar Rp 627.007.476. Sisa anggaran cukup besar karena alokasi anggaran gaji dan tunjangan (khususnya tunjangan fungsional) dan program kegiatan di bidang yang sudah dialokasikan tidak dapat direalisasikan karena kondisi kas daerah terbatas. Uraian sisa pagu anggaran tidak dapat terealisasi sebesar Rp. 627.000.476,- sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi: 50.962.000
Realisasi: 50.513.000
Sisa: 449.000
Sisa anggaran terdiri dari selisih biaya lembur dan sisa biaya cetak dokumen
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi: 6.710.310.00
Realisasi: 6.498.300.057
Sisa: 212.009.943
Sebagian besar sekitar 210 juta merupakan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang tidak terserap

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Alokasi: 10.000.000
Realisasi: 9.964.000
Sisa: 36.000
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Alokasi: 181.413.000
Realisasi: 165.176.113
Sisa: 16.236.887
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Alokasi: 20.846.000
Realisasi: 20.846.000
Sisa: -
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Alokasi: 1.106.733.190
Realisasi: 1.044.672.583
Sisa: 62.040.577
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Alokasi: 84.807.200
Realisasi: 83.947.428
Sisa: 859.772
Sisa merupakan selisih biaya pemeliharaan
- 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - i. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
Alokasi: 200.000.000
Realisasi: -
Sisa: 200.000.000
2 kegiatan yang direncanakan melalui APBD Perubahan 2024 tidak dilakukan.
Kegiatan appraisal di Ende dan TTS tidak dilakukan karena tenaga ahli appraisal tidak tersedia.
Kegiatan rehabilitasi bangunan di Pantai Wisata Lasiana Kupang tidak jadi dilakukan karena anggaran tidak mencukupi.
Output:
(satu) Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
Outcome:
3 dokumen hasil pengembangan Pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
1 Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi
- 3. Program Pemasaran Pariwisata
 - a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
Anggaran yang sdh tercantum dalam dokumen anggaran (DPA) tdk dapat dicairkan karena kondisi keuangan daerah. Pengajuan Permintaan pencairan ke Badan Keuangan Daerah utk kegiatan partisipasi Festival Kota Kupang tidak dapat direalisasikan
 - i. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Alokasi: 70.500.000
Realisasi: 70.488.725
Sisa: 11.275

Outcome :

Promosi 14 DTW di 7 Kabupaten

1. Kota Kupang (Pantai Wisata Lasiana, Kota Lama LLBK)
2. Kab. Kupang (Liman , Sulamanda)
3. TTS (Fatumnasi, Oetune)
4. TTU (Tanjung Bastian , Kamlung Adat Tamkesi)
5. Malaka (Teluk Gurita. Pantai Motadikin)
6. Belu (Fulan Fehan, Air Terjun Mauhalek)
7. Alor (Pantai Mali, Desa Adat Takpala)

- ii. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

Alokasi: 124.500.000

Realisasi: 89.435.550

Sisa: 35.064.450

Output :

Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri . 1 dokumen.(video promosi dan leflet promosi wisata dari 14 DTW di 7 Kabupaten)

KegiatanPartisipasi Festival Kota Kupang tdk dilaksanakan karena saat pengajuan anggaran kegiatan tdk dapat dicairkan BKD karena kondisi kas daerah

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

- i. Perluasan pasar Produk Kreatif baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik

Alokasi: 300.000.000

Realisasi: 285.818.527

Sisa: 14.181.473

100 produk ekraf dipasarkan melalui media digital

Output:

1 Dokumen Promosi untuk perluasan akses pasar produk kreatif (Kegiatan Indoensia Gastrodiplomacy Series 2024 di Labuan Bajo dan Penyusunan RAD Pengembangan Ekraf tindak lanjut Perda f NTT Nomor 4 tahun 2023 tentang Perlindungan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Ekraf dan Ekspresi Budaya Tradisional
30 Produk ekraf dipasarkan secara digital

- b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

- i. Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Alokasi: 75.000.000

Realisasi: 69.104.000

Sisa: 5.896.000

162 produk ekraf mendapat fasilitasi HKI

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

- i. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

Alokasi: 829.874.000

Realisasi: 790.045.560

Sisa: 39.828.440

240 orang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata

- b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- i. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Alokasi: 670.126.000

Realisasi: 629.752.341

Sisa: 40.737.659

Sertifikasi kompetensi tenaga Barista 30 orang, 150 mendapat Bimtek Seni

Pertunjukkan dan 150 orang pelaku ekraf pengembangan Ekraf di Desa wisata

263 orang mengikuti Pelatihan bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

30 orang bersertifikat kompetensi bidang ekonomi kreatif

Dukungan alokasi APBN melalui Dana Tugas Pembantuan tahun 2024 sebesar Rp. 1.705.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 169.841.722,- atau secara persentase sebesar 96,71%, terdiri dari dua program yaitu **Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif dan Program Dukungan Manajemen**, realisasi program dan kegiatan dijabarkan pada table berikut:

Tabel III.4. Realisasi Belanja ABPN (Tugas Pembantuan) Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Uraian
1.	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	1.705.000.000	1.649.841.722	55.158.278	
	a. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	200.000.000	199.840.788	159.212	Pelatihan bagi Pelatih Kepemanduan Wisata Berbasis Kompetensi (ToT) di Kupang bagi 26 pemandu wisata
	b. Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif	200.000.000	199.683.660	316.340	Pelatihan/workshop Bidang Ekonomi Kreatif (50 orang peserta)
	c. Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	600.000.000	550.247.734	49.752.266	Kegiatan SISPARNAS (Bimtek, Workshop, Penyusunan database pariwisata NTT)
	d. Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (event)	500.000.000	495.373.600	4.626.400	Konfrensi dan event (target 3 event) Kegiatan Festival Kelabba Madja di Sabu, Festival One Be Nagekeo dan Festival Tenun Kreatif di TTU
	e. Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fashion	205.000.000	204.695.940	304.060	Workshop Pengembangan Ekosistem Ekraf di Kupang bagi 50 orang peserta
2.	Program Dukungan Manajemen				
	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	130.000.000	124.719.765	5.280.235	Perencanaan, koordinasi, laporan pertanggungjawaban,
	Total	1.835.000.000	1.774.561.487	60.438.513	96,71 %

Realisasi keluaran program dan kegiatan Tugas Pembantuan pada satuan kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai target 100% dan realisasi keuangan 96,71 %, sisa pagu realisasi merupakan selisih harga satuan perencanaan dengan harga kontrak sesuai harga pasar pada pelaksanaan pelaksanaan kegiatan, item-item selisih berupa harga tiket dan sewa Gedung kegiatan.

2. Pencapaian Kinerja Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pencapaian indikator keluaran kegiatan dan hasil diukur sesuai target dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja dan Renstra, penjabaran capaian masing masing -indikator sebagai berikut:

Tabel III.5. Realisasi Kinerja Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2022)	Target Capaian Tahun 2024	Capaian 2024	Penilaian Capaian
Tujuan: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Promosi Daya Tarik Wisata dan Kualitas SDM Pariwisata serta Ekonomi Kreatif						
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara	100 %	100 %	0	Belum Berhasil
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	24 Destinasi	1 Destinasi	0	Belum Berhasil
			02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	NA %	4.17 %	0	Belum Berhasil
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	NA Dokumen	2 Dokumen	0	Belum Berhasil
			03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi	100 %	100 %	97,3%	Sangat Baik
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Melalui OSS	44 Rekomendasi	100% Rekomendasi	97,3%	Sangat Baik
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)	0 %	31.82 %	31,82	Sangat Baik
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah DTW yang Dipromosikan	NA DTW	14 DTW	14 DTW	Sangat Baik
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	NA Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Sangat Baik

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (Tahun 2022)	Target Capaian Tahun 2024	Capaian 2024	Penilaian Capaian
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)	0 %	33.33 %	54%	Sangat Baik
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	165 Dokumen HKI	100 Dokumen HKI	162 Dokumen	Sangat Baik
			02. Persentase produk ekonomi kreatif yang dipasarkan melalui media digital	0 %	33.33 %	10%	Belum Berhasil
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital	NA Produk Ekraf	100 Produk Ekraf	30 Produk Ekraf	Belum Berhasil
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			01. Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	0 %	33.33 %	33.33 %	Sangat Baik
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata	96 Orang	40 Orang	200 Orang	Sangat Baik
			02. Persentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya dan Fashion) yang bersertifikat	0 %	33.33 %	25%	Baik
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif	NA Orang	40 Orang	25 Orang	Cukup Berhasil

Pada beberapa indikator target dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah belum berhasil mencapai target sesuai rencana, penyebab ketidakberhasilan pencapaian indikator tersebut sebagai berikut:

- a. Persentase destinasi yang ditangani/dipelihara dengan pencapaian 0% disebabkan alokasi kegiatan di alokasikan pada perubahan anggaran pada bulan November 2024 terdiri dari dua kegiatan utama yaitu rehap fasilitas Kawasan wisata Lasiana dan pelaksanaan appraisal cottage di kawasan wisata Fatumnasi kabupaten TTS dan Kawasan wisata kelimutu kabupaten Ende, kegistan tersebut tidak dapat diselenggarakan akibat tidak tersedia tenaga ahli apraisal

bersertifikat. Untuk kegiatan rehab bangunan di kawasan wisata Lasiana akibat keterbatasan waktu pelaksanaan dan alokasi dana tidak mencukupi.

- b. Persentase produk ekonomi kreatif yang dipasarkan melalui media digital dengan pencapaian 10% dari target 33%. Pencapaian kegiatan merupakan jumlah fasilitasi produk ekonomi kreatif dalam perluasan pasar dengan memasarkan produk melalui media digital, pencapaian jumlah keluaran sebesar 30 produk dari target 100 produk.
- c. Persentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya dan Fashion) yang bersertifikat dengan pencapaian 25% dari target 30% merupakan kegiatan sertifikasi kompetensi barista dengan jumlah kegiatan tidak mencapai target akibat keterbatasan alokasi biaya sertifikasi pada jenis keahlian tersebut.

3. Pencapaian Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pada Perjanjian Kinerja

Tabel III.6. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI
			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah				
1.	Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	7,38 %	7,59 %	7,77%
		Harga Berlaku			
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp Juta)	N/A	80.758,35 Juta	934.730 juta
		Lama Tinggal Wisatawan (hari)	1,75 Hari	2 Hari	1,49 Hari
		Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.624.891 Orang	1.065.378 Orang	1.002.253 orang

NO	URAIAN		ALOKASI		TARGET	REALISASI
B.	Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan					
1	APBD					
	Belanja (program)		Rp.	10.435.071.360	Realisasi minimal 85%	93,99 %
	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	8.165.071.360	Realisasi minimal 90 %	95,98 %
	2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	200.000.000	Realisasi minimal 85 %	-
	3.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp.	195.000.000	Realisasi minimal 85 %	81,53 %
	4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	Rp.	375.000.000	Realisasi minimal 85 %	94,40 %
	5.	Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	1.500.000.000	Realisasi minimal 85 %	94,60 %
	Pendapatan		Rp.	310.000.000	Realisasi minimal 90 %	96,92 %

	Jumlah Belanja + Pendapatan	Rp.	10.745.071.360	Realisasi minimal 90 %	94,07
2	APBN				
	Program Tugas Pembantuan	Rp.	1.835.000.000	Realisasi minimal 90%	96,71 %
	1. Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	1.705.000.000	Realisasi minimal 90%	96,76 %
	2. Program Dukungan Manajemen	Rp.	130.000.000	Realisasi minimal 90%	95,94 %
	Jumlah Tugas Pembantuan	Rp.	1.835.000.000	Realisasi minimal 90%	96,71 %

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C.	Belanja menggunakan Aplikasi <i>E-Purchasing</i> (e-catalog dan toko daring) Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Persentase penggunaan <i>E Purchasing</i> dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Minimal 40 %	35,63 %
D.	Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% per Tanggal 31 Desember Tahun 2024	Persentase realisasi Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak per Tanggal 31 Desember Tahun 2024	100 %	100 % (untuk 6 kontrak)
E.	Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024	Penyampaian LKSKPD dan LKPJ, LPPD dan LKIP	LKSKPD 26 Januari 2024 Dan LKPJ, LPPD dan LKIP 12 Februari 2024	Telah diselesaikan sesuai target waktu
F.	Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024	Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan	paling lambat Tanggal 31 Maret 2024	Telah diselesaikan sesuai target waktu
G.	Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80)	Kategori Penilaian SAKIP Dinas Parekraf NTT	Minimal BB	Nilai A
H.	Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK	Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP	minimal Predikat BAIK	BAIK
I.	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:			
		Persentase TL Rekomendasi BPK dan APIP Tahun 2024	Administrasi 100%, Keuangan 80%	Administrasi 100%, Keuangan 80%
		Persentase TL Rekomendasi BPK dan APIP di bawah Tahun 2024	Administrasi 100%, Keuangan 80%.	Administrasi 85%, Keuangan 75 %
J.	Inovasi Perangkat Daerah minimal 5 (lima) jenis	Jumlah Inovasi	5 Inovasi	2 inovasi (Sekretariat / SINGKAT dan bidang Ekraf/exoticeastnusatenggara)
K.	Penciptaan Arsip Elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%	Persentase penciptaan arsip elektronik melalui aplikasi SRIKANDI	Minimal 80 %	74,87 %

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
L.	Informasi Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Minimal Kategori Baik (76,61-88,30)	Baik
M.	Informasi Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99)	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah	Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99)	Menuju Informatif
N.	Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah	Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah	1	1 (Kerjasama dgn PT. Jamkrida dan Brief Pro)

Sumber: hasil olahan,2025

Indikator perjanjian kinerja Pada indikator sasaran strategis terdapat satu indikator masih di bawah angka target capaian yaitu lama tinggal wisatawan dengan realisasi 1,75 hari dari target 2 hari. Faktor penyebab pecapaian target adalah rata-rata waktu kunjungan wisatawan pada Kawasan wisata tidak dalam satu paket wisata terencana dalam waktu lebih dari 7 hari untuk mengunjungi daya Tarik wisata yang berada pada Kawasan tersebut atau daya Tarik wisata di Kawasan terdekat.

Pada bagian pelaksanaan anggaran program dan kegiatan, terdapat satu belanja program tidak mencapai target realisasi yaitu program pemasaran pariwisata. Kendala penyerapan anggaran kegiatan diakibatkan keterbatasan ketersediaan anggaran daerah dengan sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, beberapa aktifitas tidak dapat diselenggarakan sehingga tidak terjadi penyerapan anggaran.

Pada indikator belanja Belanja menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e-catalog dan toko daring) Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah dengan realisasi 35,63% diakibatkan pada beberapa jenis belanja barang dan jasa belum tersedia pada e-catalog dan toko daring sehingga pengadaan dilakukan dengan metode lain.

4. Pencapaian Kinerja Pada Renstra Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2021	Target 2024	Capaian 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kuantitas promosi pariwisata (jumlah kegiatan promosi)	n/a	14 kegiatan promosi	14 kegiatan promosi	Lokasi DTW: Lasiana, Oetune, Tanjung bastian, dan Tamkesi; Promosi leaflet daya Tarik wisata
		2. Meningkatnya jumlah produk ekraf yang dipasarkan berbasis	n/a	100 produk	30 produk	Lokasi kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2021	Target 2024	Capaian 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		digital (jumlah produk)				
		3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata (orang bersertifikat)	96 orang	40 orang	240 orang	Lokasi: Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Timur, Kab. Belu, Kab. Sumba Timur, Kab. Sikka
		4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM ekonomi kreatif (orang bersertifikat)	n/a	40 orang	30 orang	Lokasi Kab Manggarai Timur
		5. Meningkatnya kualitas destinasi wisata (jumlah lokasi DTW)	14 Destinasi	1 Destinasi	0 Destinasi	Kegiatan tidak dilaksanakan
		6. Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui fasilitasi HKI (jumlah fasilitasi HKI)	165 HKI	100 HKI	162 HKI	Lokasi 7 Kabupaten: Kota Kupang, Kab. Sumba Barat Daya, Kab Sumba Barat, Kab. Alor, Kab, Fores Timur, Kab. Belu, Kab Timor Tengah Utara

Terdapat beberapa indikator masih belum mencapai target, diantaranya adalah indikator Meningkatnya jumlah produk ekraf yang dipasarkan berbasis digital (jumlah produk) dengan capaian 30 produk dari target 100 produk diakibatkan keterbatasan alokasi anggaran pada indikator ini. Pada indikator Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM ekonomi kreatif (orang bersertifikat) dengan capaian 30 orang dari target 100 orang diakibatkan keterbatasan alokasi pada kegiatan tersebut. Untuk indikator Meningkatnya kualitas destinasi wisata (jumlah lokasi DTW) dengan capaian nol dari target 1 destinasi diakibatkan pembatalan pelaksanaan kegiatan renovasi fasilitas penunjang pada Kawasan destinasi wisata pantai Lasiana.

D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan kepariwisataan dan Industri Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena karena terkendala pada keterbatasan keuangan daerah. Adapun permasalahan-permasalahan/hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Hambatan Internal:

- Rendahnya kualitas produk wisata;
- Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pada objek dan daya tarik wisata;
- Rendahnya kualitas dan jangkauan promosi dan informasi Pariwisata;
- Rendahnya kualitas SDM aparatur, masyarakat dan pelaku kebudayaan dan pariwisata;

- e. Lemahnya koordinasi lintas sektor, lintas regional, lintas pelaku Pariwisata dan masyarakat;
 - f. Kebijakan pembangunan;
 - g. Database kepariwisataan yang tidak komprehensif sebagai akibat dari lemahnya sistem pelaporan dari Kabupaten/Kota sebagai sumber data;
 - h. Produk hukum (Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT) yang telah ada perlu segera ditindaklanjuti agar dapat menjadi suatu payung hukum yang berkekuatan tetap;
 - i. Terbatasnya kemampuan finansial pemerintah sebagai akibat dari banyaknya urusan yang harus ditangani oleh pemerintah.
 - j. Keberpihakan untuk proporsional prioritas anggaran untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan pada dokumen RENSTRA dan RENJA.
2. Hambatan Eksternal:
- a. Kurangnya apresiasi terhadap bidang Pariwisata dan Industri Kreatif pendukung pariwisata di tingkat Kabupaten/ Kota sehingga bidang ini belum dianggap sebagai sektor andalan. Hal ini nampak dari rendahnya dukungan dana yang diberikan, yang mengakibatkan banyak program dan kegiatan yang diusulkan tidak diakomodir pada APBD Kabupaten/Kota;
 - b. Rendahnya aksesibilitas ke destinasi pariwisata sehingga menimbulkan *high cost* sebagai akibat dari tersebarnya destinasi/ kawasan/ daya tarik wisata tersebut pada berbagai pulau, dan tidak tetapnya *time schedule* dari penerbangan dan pemberangkatan pesawat-pesawat komersial dan kapal-kapal perintis;
 - c. Terdapat banyak event-event budaya yang dibatalkan karena terkendala pada keterbatasan keuangan daerah;
 - d. Rendahnya investasi dan minat usaha di bidang Pariwisata dan Industri Kreatif pendukung pariwisata;
 - e. Persaingan antar daerah tujuan wisata yang semakin kompetitif;
 - f. Kondisi politik dan keamanan dalam negeri.
 - g. Partisipasi pelaku pariwisata/masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan Pariwisata di Provinsi NTT masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan, baik itu keterbatasan dana maupun kemampuan dari aparaturnya maupun pelaku pariwisata dan industri kreatif pendukung pertumbuhan pariwisata.

E. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF YANG DIAMBIL

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditemui sebagaimana telah disebut di atas, maka telah ditempuh/diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Melakukan sosialisasi tentang peranan Pariwisata dalam pembangunan kepada berbagai kalangan;

3. Melakukan Rapat Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata antara Dinas Pariwisata Provinsi NTT dengan institusi yang menangani bidang Pariwisata dan Industri Kreatif Bidang Pariwisata di Kabupaten/ Kota se-NTT;
4. Melakukan pembinaan kepada BPW/APW agar menyusun paket tour yang dapat menjual beberapa daya tarik wisata dan atraksi wisata dalam satu paket sehingga dapat menekan biaya transportasi;
5. Melakukan penajakan kerjasama dengan mitra kerja Pariwisata di luar NTT untuk dapat melakukan kerjasama dengan mitranya di NTT;
6. Mengadakan Rapat Koordinasi lintas sektor baik di tingkat Provinsi maupun di dalam daerah agar mendapatkan dukungan dalam pembangunan infrastruktur dan suprastruktur dari dan ke daya tarik wisata – dalam rangka mewujudkan komponen 5A Pariwisata guna mempermudah aksesibilitas, pemberian rasa aman selama berada di NTT;
7. Mengadakan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka penyediaan media promosi melalui penyediaan situs internet yang dapat diakses oleh setiap kelas wisatawan;
8. Mengadakan kerjasama dengan pihak swasta guna mendukung pelaksanaan pembangunan kepariwisataan;
9. Menyertakan aparat Dinas Pariwisata Provinsi NTT dalam berbagai Diklat teknis fungsional yang diadakan baik di dalam maupun di luar NTT;
10. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dan pelaku Pariwisata mengadakan Diklat bagi masyarakat dan pelaku Pariwisata dan Industri Kreatif;
11. Menyelenggarakan dan mengikuti berbagai event atraksi Pariwisata dan Industri Kreatif Bidang Pariwisata di Kabupaten/Kota maupun di luar NTT secara *offline* maupun *online* (daring);
12. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi;
13. Pengelolaan data dan informasi pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif khususnya *sharing* data dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas kolaborasi pembangunan parekraf di NTT dalam skema *pentahelix*.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan rangkaian evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara transparan sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, membantu mengukur dan mewujudkan visi Kepala Daerah guna kesejahteraan masyarakat hingga meningkatkan pertanggungjawaban kinerja aparatur sipil negara. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja kedepan. LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

Secara umum, program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT pada Tahun Anggaran 2024 telah mengarah kepada sasaran-sasaran yang direncanakan. Namun pelaksanaan program dan kegiatan tersebut belum memenuhi target indikator capaian kinerja sasaran yang ditentukan untuk tahun 2024 dikarenakan beberapa kendala dalam pelaksanaannya salah satunya adalah keterbatasan keuangan daerah. **Tingkat pencapaian kinerja sasaran Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebesar 84.06% atau dapat dikategorikan “Berhasil”.** Pencapaian indikator capaian kinerja ini juga didukung melalui kemitraan yang dilaksanakan perangkat daerah lain, perangkat daerah di Tingkat kabupaten/kota dan pelaku pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya sejalan dengan kebijakan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan dengan pendekatan ekosistem pariwisata yang kolaboratif dan inovatif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

B. SARAN

Pengembangan pariwisata di era pasca pandemi saat ini akan memberikan peluang bagi setiap pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat mencari celah dan mendapatkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menyebutkan *pivot* dan *rebound* merupakan salah satu strategi yang dapat menjadi solusi. Strategi *pivot* yaitu melihat peluang yang ada di masa pandemi, seperti di bidang kuliner, kesehatan, digital, dan lain sebagainya yang menjadi prioritas utama masyarakat saat ini. Strategi *rebound* adalah strategi yang dilakukan dengan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan saat pandemi telah berakhir, sehingga usaha yang dilakukan tidak berhenti dan akan terus berjalan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan selama Tahun 2024, dan untuk dipergunakan selanjutnya.

Kupang, Januari 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP 197111271998031005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

JL. Frans Seda Nomor 72 Kupang 85111
Telp/Fax (0380) 826384 Pos-el : dinparekrafntt@gmail.com
Laman : www.disparekrafntt.online

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT

No	Reviewer	Catatan/Koreksi
1.	Fungsional Perencana	• Verifikasi data capaian dan kendala pencapaian indikator kinerja Tahun 2024; • Penghitungan presentasi capaian dengan bukti data dukung.
2.	Sekretaris	• Sistematika penulisan disesuaikan dengan panduan yang berlaku; • Target dan realisasi kinerja didasarkan pada kompilasi data dari kabupaten/kota, Badan Pusat Statistik (BPS) dan bidang pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT; • Realisasi anggaran disesuaikan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT per 31 Desember 2024.
3.	Kepala Dinas	• Pencapaian kinerja disampaikan berdasarkan data realisasi yang telah dikompilasi; • Permasalahan pencapaian beberapa target indikator adalah karena faktor keterbatasan keuangan daerah sehingga program/kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

Kupang, Januari 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP 197111271998031005

LKIP 2024 |

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Noldy Hosea Pellokila, S. Sos., M.M**

Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Andriko Noto Susanto**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 1 November 2024

Pihak Kedua,

Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama,

Noldy Hosea Pellokila, S. Sos., M.M

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Fungsional Perencana Ahli Muda	
Analisis Data dan Informasi	

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	7,38 %	7,59 %	$\frac{A + B + C}{Z} \times 100\%$ Ket : A : Kontribusi lapangan usaha sektor penyediaan akomodasi dan makan minum B : Kontribusi lapangan usaha sektor transportasi – pergudangan C : Kontribusi lapangan usaha sektor jasa lainnya Z : Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi NTT Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp Juta)	N/A	80.758,35 Juta	$(15\% \times D) + (70\% \times E) + (100\% \times F) + (90\% \times G)$ Ket : D : Kontribusi lapangan usaha sub sektor penyediaan makan minum E : Kontribusi lapangan usaha sub sektor industri makanan dan minuman F : Kontribusi lapangan usaha sub sektor industri pengolahan lainnya G : Kontribusi lapangan usaha sub sektor industri tekstil dan pakaian jadi
		Lama Tinggal Wisatawan (hari)	1,75 Hari	2 Hari	$R L T^* = J H T / J W M$ Keterangan : R L T : Rata-rata Lama Tinggal J H T : Jumlah Hari Tinggal Wisatawan J W M : Jumlah Wisatawan Menginap *Data dipublikasi oleh BPS NTT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.624.891 Orang	1.065.378 Orang ✓	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 (data kompilasi 22 Kabupaten/Kota)

B. Pelaksanaan Anggaran

NO	Uraian		Alokasi		Keterangan
1	APBD				
	a) Belanja (program)		Rp. 10.435.071.360		Realisasi minimal 85%
	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	8.165.071.360	Realisasi minimal 90 %
	2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	200.000.000	Realisasi minimal 85 %
	3.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp.	195.000.000	Realisasi minimal 85 %
	4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp.	375.000.000	Realisasi minimal 85 %
	5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	1.500.000.000	Realisasi minimal 85 %
	b) Pendapatan		Rp. 310.000.000		Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja + Pendapatan		Rp. 10.745.071.360		Realisasi minimal 90%

2	APBN			
	a) Program Dekonsentrasi	Rp.	-	-
	b) Program Tugas Pembantuan	Rp.	1.835.000.000	Realisasi minimal 90%
	1. Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	1.705.000.000	Realisasi minimal 90%
	- Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Rp.	200.000.000	Realisasi minimal 90%
	- Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp.	200.000.000	Realisasi minimal 90%
	- Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Rp.	600.000.000	Realisasi minimal 90%
	- Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	Rp.	500.000.000	Realisasi minimal 90%
	- Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	Rp.	205.000.000	Realisasi minimal 90%
	2. Program Dukungan Manajemen	Rp.	130.000.000	Realisasi minimal 90%
	- Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	Rp.	130.000.000	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Tugas Pembantuan	Rp.	1.835.000.000	Realisasi minimal 90%

- C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (*e-catalog* dan toko daring) Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% per tanggal 31 Desember Tahun 2024;
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;
- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;

- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:**
1. TL rekomendasi Tahun 2024; Administrasi 100%, Keuangan 80%
 2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2024; Administrasi 100%, Keuangan 80%.
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah minimal 5 (lima) jenis;**
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;**
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);**
- N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.**

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,



Andriko Noto Susanto

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Organisasi	

Kupang, 1 November 2024

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Noldy Hosea Pellokila, S. Sos., M.M

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Fungsional Perencana Ahli Muda	
Analisis Data dan Informasi	

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Frans Seda No. 72 Kupang – NTT
Telp (0380) 826384 Fax (0380) 826384

 parekrafntt.id  Dinas Pariwisata Provinsi NTT  @tourism.ntt  @disparekrafNTT  Dinas Parekraf NTT